



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**

# **RANCANGAN RENJA 2024**

## **DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

**Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**

Jl. Muso Bin Salim No.06 ,Tenggarong.  
website: [www.pertaru.kukarkab.go.id](http://www.pertaru.kukarkab.go.id)

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala, Rancangan Rencana Kerja Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Ranwal Renja ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana Kerja ini memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta yang terpenting adalah memuat mengenai evaluasi, analisis kinerja, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya namun telah menjadi komitmen kami untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Dengan harapan peran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi, misi dan program yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Tenggarong, Maret 2023

Kepala Dinas  
Pertanahan dan Penataan Ruang



**SETIANTO NUGROHO AJL, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671027 199403 1 008

*Rancangan Rencana Kerja  
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU .....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan OPD .....	51
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.....	58
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	63
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	101
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG .....</b>	<b>102</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	102
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	104
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>105</b>
4.1 Program dan Kegiatan .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>151</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis Lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah tersebut disusun dalam dokumen Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan untuk mencapai target kinerja utama kepala daerah.

Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan Tahun 2022.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
- q. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
- r. Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
- s. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B – 370/BAPP/V.1/065.II/02/2022 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan renja ini adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2023.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara mengaju kepada Permendagri 86 Tahun 2017, dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Program Dan Kegiatan

**BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian Renstra. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) urusan Pertanahan dan urusan penataan ruang tahun 2023 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, melaksanakan 10 (Sepuluh) Program dan 22 (Dua Puluh Dua) Kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra urusan Pertanahan dan Penataan Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini

Berikut ini adalah realisasi keuangan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022 :

Tabel III.21 Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Kegiatan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12,594,409,917.00</b>	<b>11,712,408,036.00</b>	<b>882,001,881.00</b>	<b>93</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>124,447,400.00</b>	<b>552,600.00</b>	99.56
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,000,000	74,498,000	502,000	99.33
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	49,949,400	50,600	99.9
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8,195,884,919.00</b>	<b>7,536,984,940.00</b>	<b>658,899,979.00</b>	91.96
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	7,909,764,919	7,314,004,940	595,759,979	92.47

*Rancangan Rencana Kerja  
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara*

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		ASN				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	286,120,000	222,980,000	63,140,000	77.93
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>78,099,999.00</b>	<b>78,076,000.00</b>	<b>23,999.00</b>	99.97
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	78,099,999	78,076,000	23,999	99.97
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>99,977,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	99.98
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,000,000	99,977,500	22,500	99.98
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>707,983,445.00</b>	<b>656,159,124.00</b>	<b>51,824,321.00</b>	92.68

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34,967,700	34,776,350	191,350	99.45
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104,947,200	104,831,000	116,200	99.89
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163,175,400	161,466,120	1,709,280	98.95
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,000,000	59,756,050	243,950	99.59
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344,893,145	295,329,604	49,563,541	85.63
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>313,233,000.00</b>	<b>299,971,950.00</b>	<b>13,261,050.00</b>	95.77
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313,233,000	299,971,950	13,261,050	95.77
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,409,121,084.00</b>	<b>1,360,087,066.00</b>	<b>49,034,018.00</b>	96.52
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207,025,600	186,794,620	20,230,980	90.23
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,202,095,484	1,173,292,446	28,803,038	97.6
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,665,087,470.00</b>	<b>1,556,704,056.00</b>	<b>108,383,414.00</b>	93.49

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,500,000	33,451,850	34,048,150	49.56
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350,104,000	279,697,820	70,406,180	79.89
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,247,483,470	1,243,554,386	3,929,084	99.69
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>66,360,000.00</b>	<b>43,640,000.00</b>	60.33
		<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>66,360,000.00</b>	<b>43,640,000.00</b>	60.33
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi	110,000,000	66,360,000	43,640,000	60.33

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha				
	Meningkatnya Penanganan Sengketa tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>164,500,000.00</b>	<b>163,892,500.00</b>	<b>607,500.00</b>	99.63
		<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>164,500,000.00</b>	<b>163,892,500.00</b>	<b>607,500.00</b>	99.63
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	114,500,000	114,098,500	401,500	99.65
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	49,794,000	206,000	99.59
	Meningkatnya Persentase penetapan tanah untuk	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>234,948,000.00</b>	<b>15,052,000.00</b>	93.98

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
	pembangunan fasilitas umum	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	250,000,000.00	234,948,000.00	15,052,000.00	93.98
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000	234,948,000	15,052,000	93.98
	Meningkatnya Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	280,000,000.00	198,280,000.00	81,720,000.00	70.81

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
	redistribusikan ke Masyarakat	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	200,000,000.00	120,925,000.00	79,075,000.00	60.46
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	100,000,000	91,905,000	8,095,000	91.91
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100,000,000	29,020,000	70,980,000	29.02
		<b>Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	80,000,000.00	77,355,000.00	2,645,000.00	96.69

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000	77,355,000	2,645,000	96.69
		<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>61,020,000.00</b>	<b>13,980,000.00</b>	81.36
		<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>61,020,000.00</b>	<b>13,980,000.00</b>	81.36
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000	61,020,000	13,980,000	81.36
	Meningkatnya Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>468,000,500.00</b>	<b>311,435,343.00</b>	<b>156,565,157.00</b>	66.55
		<b>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>	<b>52,670,000.00</b>	<b>38,595,000.00</b>	<b>14,075,000.00</b>	73.28

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52,670,000	38,595,000	14,075,000	73.28
		<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>415,330,500.00</b>	<b>272,840,343.00</b>	<b>142,490,157.00</b>	65.69
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	60,000,000	36,610,000	23,390,000	61.02
		Pemanfaatan Tanah Kosong	355,330,500	236,230,343	119,100,157	66.48
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>147,245,000.00</b>	<b>2,755,000.00</b>	98.16
	Meningkatnya Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>147,245,000.00</b>	<b>2,755,000.00</b>	98.16
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	150,000,000	147,245,000	2,755,000	98.16

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	50,540,000.00	37,570,000.00	12,970,000.00	74.34
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	50,540,000.00	37,570,000.00	12,970,000.00	74.34
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	50,540,000	37,570,000	12,970,000	74.34
Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahana Pola Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	19,182,450,417.00	2,301,297,655.00	218,702,345.00	91.32
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,230,000,000.00	1,196,400,027.00	33,599,973.00	97.27

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	450,000,000	416,538,929	33,461,071	92.56
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	780,000,000	779,861,098	138,902	99.98
		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>585,000,000.00</b>	<b>577,575,265.00</b>	<b>7,424,735.00</b>	98.73
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	585,000,000	577,575,265	7,424,735	98.73
		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>172,002,000.00</b>	<b>47,998,000.00</b>	78.18

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	160,000,000	139,757,000	20,243,000	87.35
		Sistem Informasi Penataan Ruang	60,000,000	32,245,000	27,755,000	53.74
		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17,147,450,417.00</b>	<b>355,320,363.00</b>	<b>129,679,637.00</b>	<b>73.26</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	200,000,000	152,399,363	- 16,783,363	76.2
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	65,000,000	59,309,000	5,691,000	91.24

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	135,616,000	95,154,000	104,846,000	70.16
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	84,384,000	48,458,000	35,926,000	57.43
<b>TOTAL</b>			<b>16,662,450,417</b>	<b>15,234,456,534.00</b>	<b>1,427,993,883.00</b>	<b>91.43</b>

Dari tabel di atas disampaikan realisasi capaian kinerja dari Sepuluh (10) program yang dilaksanakan pada tahun 2022, hasil capaian terendah yaitu dari Program Program Pengelolaan Izin Lokasi. Sedangkan untuk capain yang tinggi tersebar di beberapa program dan kegiatan. Adapun penjelasan program kegiatan berdasarkan memenuhi target atau tidaknya, dijelaskan pada uraian di bawah ini :

### 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikelompokkan beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Tujuh (7) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan, 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan tersebut satu kegiatan tidak memenuhi target yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan kode rekening pada aplikasi SIPD.

### 2.1.2 Realisasi Program yang Memenuhi Target

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Delapan (8) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan, 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan ada satu kegiatan tidak memenuhi target yaitu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dikarenakan pagu sub kegiatan tersebut dialihkan ke sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk pembuatan ruang Record Centre namun 17 (Tujuh Belas) Sub kegiatan dapat memenuhitargetcapaian dengan anggaran Rp.12.594.409.917,00 terserap 93% yaitu Rp.11.712.408.036,00.
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  
Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ini dijalankan dengan Empat (4) kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan, walaupun terdapat perubahan pedoman RDTR sehingga harus melakukan pembaharuan pedoman RDTR dari sebelumnya namun semua kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi

target capaian 100%, dengan anggaran Rp 2.520.000.000,00 terserap 91.32% yaitu Rp 2.301.297.655,00

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pada program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ini dijalankan dengan Dua (2) sub kegiatan kegiatan. kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target capaian 100%, karena dari sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat difasilitasi dan diselesaikan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara sudah berjalan dengan baik. dengan anggaran terealisasi 99.63 % yaitu sebesar Rp 164.500.000,00 dari total pagu Rp. 163.892.500,00.

4. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Pada program ini dijalankan dengan satu (1) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan hanya memenuhi 29,03% dikarenakan lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum juga adanya perubahan lokasi yang tidak sesuai rencana dan berada di luar target wilayah kerja sehingga perlu koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait sehingga dengan target capaian 83% hanya dapat terealisasi 70.81 % yaitu dengan anggaran sebesar Rp 198.280.000,00 dari total pagu Rp 280.000.000,00

5. Program Penatagunaan Tanah

Pada program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini dijalankan dengan Satu) kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan Kurang memenuhi target capaian 76%, terealisasi 74.30 % dengan realisasi Rp. 37.570.000,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. Rp 50.540.000,00.

6. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong ini dijalankan dengan Dua (2) kegiatan dengan Tiga (3) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian 55%, terealisasi 66,55% dengan anggaran terealisasi Rp. 311.435.343,00 dari total pagu Rp. 468.000.500,00

7. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah ini dijalankan dengan Satu kegiatan dengan Satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian 82%, terealisasi 98,16% dengan anggaran terealisasi Rp. 147.245.000,00 dari total pagu Rp. 150.000.000,00

8. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Pada Program Pengelolaan Izin Lokasi Tanah ini dijalankan dengan Satu kegiatan dengan Satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian 15%, terealisasi 60,33% dengan anggaran terealisasi Rp. 66.360.000,00 dari total pagu Rp. 110.000.000,00

9. Program Penetapan Tanah Ulayat

Pada Program Penetapan Tanah Ulayat Tanah ini dijalankan dengan Satu kegiatan dengan Satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian 15%, terealisasi 81,36% dengan anggaran terealisasi Rp. 61.020.000,00 dari total pagu Rp. 75.000.000,00

10. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan ini dijalankan dengan Satu kegiatan dengan Satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian 8270%, terealisasi 93,98% dengan anggaran terealisasi Rp. 234.948.000,00 dari total pagu Rp. 250.000.000,00

### 2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapaiannya, Terpenuhinya, Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam Penganggaran RKA/DPA dan kode rekening pada system SIPD
2. Kurangnya koordinasi untuk beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan target.
3. Efisiensi anggaran
4. Pelaksanaan program/kegiatan Tidak maksimalnya akibat pandemi covid- 19

Adapun tercapainya target kinerja ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Penyusunan target Rencana kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas;
2. Ketersediaan dana yang sesuai dengan anggaran kas
3. Waktu dan pelaksanaan kegiatan yang mencukupi sesuai dengan *time schedule*;
4. Kualitas dan komitmen sumber daya manusia untuk pencapaian target Program/kegiatan;
5. Motivasi, arahan dan bimbingan dari pimpinan serta pengambilan keputusan yang dilakukan Pimpinan sehingga membantu optimalisasi kinerja;
6. Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan

#### 2.1.4 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

1. Dengan tercapainya target capaian program Renstra maka peningkatan sertifikasi aset Pemerintah Daerah telah ditarget setiap tahunnya untuk mengalami peningkatan;
2. Kegiatan pembinaan administrasi pertanahan di desa/kabupaten dapat dilaksanakan sesuai dengan target, harapannya dengan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan Perbub No 36 Tahun 2013
3. Penyelesaian Sengketa pertanahan memperkecil rasio sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Tersusunnya dokumen RDTR Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagaimana terlampir :

TabelT-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD TAHUN 2022  
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
01. 03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase Ketaatan Terhadap RTRW</b>	<b>Persen</b>		65	65		70	-	-

01. 03.12 2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Persen</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>9</b>	-	-
01. 03.12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	100	-	-	-
01. 03.12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	100	1	-	-

01. 03.12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-
<b>01. 03.12 2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Pelaksanaan Tata Ruang</b>	<b>Persen</b>		<b>16.77</b>	<b>16.77</b>		<b>21.81</b>	-	-
01. 03.12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	100	1	-	-
01. 03.12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-

01. 03.12 2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Pemanfaatan Tata Ruang</b>	<b>Persen</b>	-	<b>4.89</b>	<b>4.89</b>		<b>5.03</b>	-	-
01. 03.12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	100	20	-	-
01. 03.12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	-	1	1	100	1	-	-
01. 03.12 2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Pengendalian Tata Ruang</b>	<b>Persen</b>	-	<b>6.87</b>	<b>6.87</b>	-	<b>6.87</b>	-	-

01. 03.12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	100	1	-	-
01. 03.12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	100	1	-	-
01. 03.12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	20	20	20	100	20	-	-

01. 03.12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	100	1	-	-
2 10 01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>74</b>		<b>75</b>	-	-
2 10 01. 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas</b>	<b>Dokumen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	-	-

2 10 01. 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	10	100	10	-	-
2 10 01. 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	100	5	-	-
<b>2 10 01. 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel</b>	<b>Laporan</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		<b>12</b>	-	-
2 10 01. 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bul an	76	76	76	100	74	-	-

2 10 01. 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	2	2	2	100	2	-	-
2 10 01. 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	-	-
2 10 01. 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	<b>2</b>	2	2	100	2	-	-

2 10 01. 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			-	-
2 10 01. 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	Dokumen	5	5	5	100		-	-
2 10 01. 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Layanan</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	-	-
2 10 01. 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100	1	-	-

2 10 01. 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100	1	-	-
2 10 01. 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100	1	-	-
2 10 01. 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	100	1	-	-

2 10 01. 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-
2 10 01. 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	78	78	78	100	15	-	-
2 10 01. 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	100	1	-	-

<b>2.10.0 1.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Unit</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2.10.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	Unit	15	15	15	100		-	-
<b>2 10 01. 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2 10 01. 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5	5	100	5	-	-
2 10 01. 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	2	100	2	-	-
<b>2 10 01. 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		<b>14</b>	-	-

2 10 01. 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	6	100	11	-	-
2 10 01. 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	6	100	3	-	-
2 10 01. 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	100		-	-

2 10 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi</b>	<b>Persen</b>	n/a	15	15		30	-	-
2 10 02 2.01	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>	1	1	1	100	1	-	-
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	Dokumen	1	1	1	100	1	-	-

2 10 04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 10 04 2.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	2	100	2	-	-

2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	20	20	100	21	-	-
2 10 05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</b>	<b>Persen</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>75</b>	-	-
2 10 05 2.01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>	-	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>5</b>	-	-

2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	-	1	1	100	-	-	-
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	5	-	-
2 10 06	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan</b>	<b>Persen</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>83</b>		<b>86</b>	-	-

2 10 06 2.01	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum</b>	Dokumen	1	2	2	100	4	-	-
2 10 06 2.01 01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	-	-	1	-	-
2 10 06 2.01 02	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	100	1	-	-

2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	1	1	1	100	1	-	-
3 10 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-
2 10 06 2.02	<b>Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	-	-

2 10 06 2.02 01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	100	1	-	-
3 10 06 2.02 02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-
2 10 07	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	<b>Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat</b>	<b>Persen</b>	<b>n/a</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		<b>30</b>	-	-
2 10 07 2.01	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota</b>	<b>Dokumen</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	-	-

2 10 07 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	100	1	-	-
3 10 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguakuan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Penguakuan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-
2 10 08	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat</b>	<b>Persen</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>55</b>		<b>60</b>	-	-

2 10 08 2.01	<b>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>	<b>Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong</b>	<b>Dokumen</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	-	-
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Dokumen	-	1	1	100	1	-	-
<b>2 10 08 2.02</b>	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>Kegiatan</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	-	-
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Dokumen	-	1	1	100	1	-	-
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	-	1	1	100	1	-	-

2 10 09	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat</b>	<b>Persen</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	-	-
2 10 09 2.01	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	<b>Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT</b>	<b>Dokumen</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	-	-
2 10 09 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	-	1	1	100	1	-	-
3 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-
2 10 10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>76</b>		<b>77</b>	-	-

2 10 10 2.01	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>	Dokumen	1	3	3	100	1	-	-
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	100	1	-	-
3 10 10 2.01 02	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-

4 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-
--------------------------	--	--	---------	---	---	---	---	---	---	---

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT OPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Beberapa Indikator yang ditetapkan dalam mengukur kinerja, antara lain ditetapkan berdasarkan indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga dijadikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

**TABEL TC.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan		Cakupan Pelayanan Pertanahan	60	70	80	90	100
		Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	80	85	90	100	100
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	75	80	85	90

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9	10	11
			Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	83	86	90	95	100
			Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	83	84	85	86
			Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	55	60	65	70	75
2	Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	65	70	75	80	85
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahana Pola Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	70	75	80	85

Tabel Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80%	99,63%	100%	Tinggi

- Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2022 target sebesar 80% dan realisasinya 99,63% atau capaian kinerja sebesar 99,63 %. Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi namun banyak faktor kendala dari indikator pada tahun 2022 yaitu Target kinerja tercapai karena dari sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat difasilitasi dan diselesaikan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu SDM kurang sehingga pelayanan kurang maksimal dan kurang fasilitas pendukung/alat kelengkapan kerja juga diperlukan adanya aplikasi layanan administrasi pengaduan dan pelaporan berbasis teknologi.

Tabel Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap didistribusikan ke Masyarakat	83%	70,81%	85,31%	Sedang

- Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2022 target sebesar 83% dan realisasinya 70,81% atau capaian kinerja sebesar 85,31 %. Target kinerja tercapai dengan kategori sedang

karena faktor kendala dari indikator pada tahun 2022 yaitu 1 sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota hanya terealisasi sebesar 29,02% dikarenakan lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum yaitu Akses Jalan Menuju lokasi terputus juga adanya perubahan lokasi yang tidak sesuai rencana dan berada di luar target wilayah kerja yaitu penambahan untuk identifikasi di Kecamatan Samboja dalam rangka ajuan pelepasan kawasan wilayah IKN sehingga perlu koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait.

Tabel Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82%	98,16%	100%	Tinggi

- Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2022 target sebesar 82% dan realisasinya 98,16% atau capaian kinerja sebesar 119,71 %. Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi namun banyak faktor kendala dari indikator pada tahun 2022 yaitu masih tidak tertib administrasi pertanahan ditingkat Desa/kelurahan dan kecamatan seperti pola pengarsipannya masih kurang rapi, sehingga banyak Salinan data yang ada di Kecamatan tercampur antara orang satu dengan yang lainnya sehingga perlu proses yang cukup Panjang untuk mengurai data tersebut dan ada beberapa Kecamatan yang tidak melengkapi beberapa informasi yang diperlukan seperti penggunaan tanah dan asal usul tanah.

Tabel Sasaran : Meningkatkan Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian  
Pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70%	93,98%	100%

- Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2022 target sebesar 70% dan realisasinya 93,98% atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi karena indikator pada tahun 2022 dapat menyelesaikan 3 Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah di 3 lokasi yaitu Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan tenggarong dan Kecamatan Muara Badak.

Tabel Sasaran : Meningkatkan Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian  
Pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	55%	66,55%	100%

- Target kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 sebesar 55% dan realisasinya 66,55% atau capaian kinerja sebesar 121 % . Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi namun banyak faktor kendala dari indikator pada tahun 2022 yaitu banyak dokumen pengadaan tanah yang dimohonkan sertipikat tidak memiliki surat asli sehingga diperlukan surat keterangan, dan membutuhkan waktu dalam pembuatannya karena melibatkan lintas OPD, lahan yang masuk HPL

Transmigrasi memerlukan rekomendasi dari dinas transmigrasi yang prosesnya lama dikarenakan dinas transmigrasi harus berkoordinasi dengan kementerian transmigrasi dan terkait permohonan sertipikat pendampingan pihak ATR/BPN untuk pengukuran tanah karena padatannya jadwal di ATR/BPN sehingga beberapa lokasi belum bisa dilaksanakan peninjauan lapangan

Tabel Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3	Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arah Pola Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	65	91,32	100%

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2022 sebesar 65 % dan terrealisasi 91,32% atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kriteria Tinggi, Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Adanya IKN sehingga dilakukan penyesuaian materi teknis baik pola maupun struktur ruang dan Adanya perubahan regulasi dan juknis materi teknis RDTR (Permen ATR No. 11/2021 dan Permen ATR no. 14/2022, sehingga harus menyesuaikan dengan Peraturan terbaru ditambah Terbatasnya waktu proses pembahasan sinkronisasi dengan Kementerian ATR/BPN .

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Pengertian isu strategis menurut Permendagri 54 Tahun 2010 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk

menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Masih rendahnya sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah;
2. Belum dimilikinya dokumen perencanaan Tata Ruang yang baik;
3. Belum terintegrasi data pengaduan dan Penanganan sengketa
4. Belum tertibnya administrasi pertanahan di masing-masing Desa/Kecamatan seperti penertiban SKPT yang menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah;
5. Banyaknya persoalan-persolan sengketa pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terselesaikan baik yang dikuasai oleh masyarakat, Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga.
6. Adaptasi perubahan kebiasaan baru dengan adanya Pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia.

### 2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

#### a. Tugas

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas embantuan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

#### b. Fungsi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
  - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
  - Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan sistematis.
2. Belum dimilikinya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) per wilayah;
3. Adanya perbedaan kondisi antara data tata ruang dan kondisi lapangan.

4. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang;
5. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah;
6. Perlunya penertiban administrasi penguasaan tanah masyarakat dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penerbitan SKPT dan PBB;
7. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa pertanahan di beberapa kecamatan/desa dan ex HGU di beberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut;
8. Belum terkoordinirnya data-data pertanahan dan penataan ruang dengan baik dan tersistem;

**2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millennium Development Goals)**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berpegang pada Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibuat dan disepakati, yaitu sebagai berikut :

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 , Sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan:

**“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**

Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

❖ **Masyarakat yang sejahtera**, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.

❖ **Masyarakat yang berbahagia**, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga

keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinegistas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang ditetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai tugasnya membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pertanahan

dan Penataan Ruang; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian beberapa misi pembangunan, di antaranya :

1. *Pencapaian Misi I* : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Dalam pelaksanaan misi ini, Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah :

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

2. *Pencapaian Misi IV* : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Dalam pencapaian misi ini Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan

Sasaran : Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang

#### 2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

1. Penyelesaian Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Meyelesaikan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah di beberapa Wilayah Di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mengatasi ketidakperpaduan rencana tata ruang dengan kondisi lapangan;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi Geografi) Pertanahan dan penataan ruang.

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan

*Rancangan Rencana Kerja  
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara*

perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Pada rancangan rencana kerja tahun 2024 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2025.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel terlampir.

**Tabel. TC-31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG</b>	Kab. Kutai Kartane gara	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75	Perse n	2,300,000,0 00	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG</b>	Kab. Kutai Kartane gara	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75	Perse n	4,100,000, 000	1,800,000,00 0	
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartane gara	Indeks Perencanaan Tata Ruang	11	Perse n	1,050,000,0 00	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartane gara	Indeks Perencanaan Tata Ruang	11	Perse n	1,050,000, 000	-	
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Doku men	400,000,00 0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Doku men	400,000,0 00	-	

2	Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	1)Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2) Jumlah Penetapan Kebijakan terkait bangunan berijin dan tidak berijin	1	Dokumen	400,000,000	Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	1)Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2) Jumlah Penetapan Kebijakan terkait bangunan berijin dan tidak berijin	1	Dokumen	400,000,000	-	
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4	Dokumen	250,000,000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4	Dokumen	250,000,000	-	
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Indeks Pelaksanaan Tata Ruang</b>	<b>15</b>	Perse n	-	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Indeks Pelaksanaan Tata Ruang</b>	<b>15.04</b>	Perse n	<b>1,500,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	

4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Dokumen	1,200,000,000	<b>1,200,000,000</b>	Tenaga Ahli untuk penyusunan Peta Dasar RDTR Kota Bangun Darat
5	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		Dokumen	-	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		Dokumen	300,000,000	<b>300,000,000</b>	Honorarium Narasumber, fasilitasi Kelompok Kerja/ Komunitas Tata Ruang
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Indeks Pemanfaatan Tata Ruang</b>	<b>5.03</b>	Perse n	<b>550,000,000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Indeks Pemanfaatan Tata Ruang</b>	<b>5.03</b>	Perse n	<b>550,000,000</b>	-	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	20	Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	20	Dokumen	400,000,000	-	

7	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dokumen	150,000,000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dokumen	150,000,000	-	
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Indeks Pengendalian Tata Ruang</b>	<b>3.75</b>	Person	<b>700,000,000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Indeks Pengendalian Tata Ruang</b>	<b>3.75</b>	Person	<b>1,000,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Dokumen	300,000,000	<b>300,000,000</b>	Tenaga Ahli untuk penyusunan dokumen insentif dan disinsentif
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	250,000,000	-	

10	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20	Kasus	150,000,000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20	Kasus	150,000,000	-	
11	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	300,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	300,000,000	-	
II	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<b>76</b>	Nilai	<b>11,054,855,936</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<b>76</b>	Nilai	<b>13,772,674,467</b>	<b>2,717,818,531</b>	

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Evaluasi	15	Dokumen	125,000,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Evaluasi	15	Dokumen	225,000,000	100,000,000	
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	75,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	175,000,000	100,000,000	- Pembuatan SOP

13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	50,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	50,000,000	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2	Laporan	8,229,050,452	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2	Laporan	8,570,708,983	341,658,531	

14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	Orang/bulan	7,979,050,452.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	Orang/bulan	8,320,708,983.00	<b>341,658,531</b>	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	250,000,000	-	

	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>50,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>75,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	75,000,000	<b>25,000,000</b>	Pensmbahan Volume honorarium PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	160,000,000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	360,000,000	200,000,000	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156	Stel	160,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156	Stel	160,000,000	-	

18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	200,000,000	<b>200,000,000</b>	Dalam rangka menunjang Dedikasi Program Idaman bid Pengembangan dan peningkatan Kapasitas SDM Aparatur perlu di alokasikan Diklat dan kursus singkat bidang teknis Pertanahan dan penataan ruang, sehingga kinerja SDM meningkat, terarah, efektif dan efisien dalam mendukung Organisasi
----	---	--	---	---	-------	---	---	--	---	----	-------	-------------	--------------------	---

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	755,000,000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	906,160,000	151,160,000	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	35,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	35,000,000	-	
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	Paket	105,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	Paket	206,160,000	101,160,000	Terdapat beberapa tambahan perlengkapan kantor di masing-masing bidang

21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	210,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	210,000,000	-	
22	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaanyang Disediakan	4	Paket	60,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaanyang Disediakan	4	Paket	60,000,000	-	

23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.790	Dokumen	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.790	Dokumen	15,000,000	-	
24	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Paket	-	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	50,000,000	<b>50,000,000</b>	Salah satu fungsi OPD bisa jemput bola memberikan pelayanan dan sekaligus sosialisasi, sehingga melalui partisipasi eksp. merah putih kecamatan adalah hal yg tepat dan baik diikuti, mengingat pembiayaan kegiatan ini belum

														teraggarkan.
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	230,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	230,000,000	-	

26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	100,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	100,000,000	-	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>				-	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Pertanahan dan penataan Ruang)</b>				<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	200,000,000	<b>200,000,000</b>	Tambahan peralatan kerja kebutuhan kantor

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>1,418,305,484</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>1,418,305,484</b>	<b>-</b>	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	215,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	215,000,000	-	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	59	Laporan	1,203,305,484	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	59	Laporan	1,203,305,484	-	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	<b>16</b>	<b>Unit</b>	<b>317,500,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	<b>16</b>	<b>Unit</b>	<b>2,017,500,000</b>	<b>1,700,000,000</b>	

30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	67,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	67,500,000	-	
----	--	------------------------	--	----	------	------------	--	------------------------	--	----	------	------------	---	--

31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	650,000,000	<b>400,000,000</b>	Asset kendaraan roda 4 dimiliki Dinas dalam mendukung aktifitas dan kinerjanya sangat diprioritaskan dalam pemenuhan jumlah serta pembiayaan maintenancenya, karena kondisi kendaraan yg sdh diatas 10 tahun, dgn mobilitas kegiatan yang tinggi, sehingga dibutuhkan Penambahan penganggaran ut menjadi perhatiannya
----	---	------------------------	--	---	------	-------------	---	------------------------	--	---	------	-------------	--------------------	---

32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	1	Unit	1,300,000,000	<b>1,300,000,000</b>	Rehab Gedung Kantor dan Rumah Dinas
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	45	Perse n	100,000,000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	45	Perse n	100,000,000	-	
	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	JumlahLaporan HasilKegiatanPemberianIzin LokasiDalam 1(Satu)DaerahKabupaten/Kota	1	Doku men	100,000,000	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	JumlahLaporan HasilKegiatanPemberianIzin LokasiDalam 1(Satu)DaerahKabupaten/Kota	1	Doku men	100,000,000	-	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	1	Doku men	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	1	Doku men	100,000,000	-	

III	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	90	Perse n	300,000,000	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	90	Perse n	300,000,000	-	
	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23	Doku men	300,000,000	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23	Doku men	300,000,000	-	
34	Inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Doku men	200,000,000	Inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Doku men	200,000,000	-	
35	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21	Berit a Acara	100,000,000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21	Berita Acara	100,000,000	-	

IV	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	80	Perse n	350,000,000	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	80	Perse n	4,850,000,000	4,500,000,000	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Doku men	350,000,000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Doku men	4,850,000,000	4,500,000,000	

36	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	350,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	4,850,000,000	<b>4,500,000,000</b>	Belanja Modal Lahan : - Dokumen Perluasan Kantor Camat Tabang dan Dokumen Penyiapan Lokasi TPA Kecamatan Tabang (Kolaborasi), - Dokumen Pengadaan Tanah untuk SD 011 Desa Salo Cella (Kolaborasi), - Pembebasan lahan di belakang kantor DPPR
V	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan</b>	<b>90</b>	Perse n	<b>600,000,000</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan</b>	<b>90</b>	Perse n	<b>600,000,000</b>	-	

	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah KelebihanMaksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum	<b>4</b>	Dokumen	<b>400,000,000</b>	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah KelebihanMaksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum	<b>4</b>	Dokumen	<b>400,000,000</b>	<b>-</b>	
37	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	200,000,000	<b>100,000,000</b>	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah sama dengan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.

38	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	(100,000,000)	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah sama dengan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.
39	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokumen	100,000,000	-	

40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	-	
VI	<b>Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>200,000,000</b>	<b>Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>200,000,000</b>	<b>-</b>	

41	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	200,000,000	<b>100,000,000</b>	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sama dengan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.
----	--	------------------------	--	---	---------	-------------	--	------------------------	--	---	---------	-------------	--------------------	--

42	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Doku men	100,000,000	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Doku men	-	<b>(100,000,000)</b>	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sama dengan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.
----	--	--	--	---	-------------	-------------	--	--	--	---	-------------	---	----------------------	--

VII	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	45	Perse n	250,000,000	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	45	Perse n	250,000,000	-	
	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	2	Doku men	250,000,000	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota</b>	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	2	Doku men	250,000,000	-	

43	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	175,000,000	<b>100,000,000</b>	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sama dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.
----	---	------------------------	--	---	---------	------------	---	------------------------	--	---	---------	-------------	--------------------	--

44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	<b>(100,000,000)</b>	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sama dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.
----	---	------------------------	--	---	---------	-------------	---	------------------------	--	---	---------	---	----------------------	--

45	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Kab. Kutai Kartanegara ( 18 Kecamatan)	Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat	1	Dokumen	75,000,000	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Kab. Kutai Kartanegara ( 18 Kecamatan)	Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat	1	Dokumen	75,000,000	-	
VIII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat</b>	<b>65</b>	<b>Perse n</b>	<b>824,799,664</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat</b>	<b>65</b>	<b>Perse n</b>	<b>824,799,664</b>	-	
	<b>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	<b>1</b>	Dokumen	<b>100,000,000</b>	<b>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	<b>1</b>	Dokumen	<b>100,000,000</b>	-	
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	Laporan	100,000,000	-	

	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2	Dokumen	724,799,664	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2	Dokumen	724,799,664	-	
47	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	Laporan	100,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	Laporan	-	(100,000,000)	Output yang dihasilkan dari kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong sama dengan pemanfaatan tanah kosong sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.

48	Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Dokumen	624,799,64	Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Dokumen	724,799,664	<b>100,000,000</b>	Output yang dihasilkan dari kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong sama dengan pemanfaatan tanah kosong sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.
IX	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>		Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	<b>84</b>	Perse n	<b>200,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>		Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	<b>84</b>	Perse n	<b>391,989,000</b>	<b>191,989,000</b>	
	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>		Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	<b>2</b>	Dokumen	<b>200,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>		Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	<b>2</b>	Dokumen	<b>391,989,000</b>	<b>191,989,000</b>	
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1	Dokumen	192,545,000	<b>92,545,000</b>	Sosialisasi dan SKPT Ke Kecamatan

50	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1	Dokumen	100,000,000	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1	Dokumen	199,444,000	<b>99,444,000</b>	Sosisasi Revisi Perbub
X	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		<b>Persentase tersedianya Penatagunaan Tanah</b>	<b>78</b>	<b>Perse n</b>	<b>200,000,000</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		<b>Persentase tersedianya Penatagunaan Tanah</b>	<b>78</b>	<b>Perse n</b>	<b>200,000,000</b>	-	
	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>	<b>2</b>	<b>Doku men</b>	<b>200,000,000</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>	<b>2</b>	<b>Doku men</b>	<b>200,000,000</b>	-	
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Lapor an	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Lapor an	100,000,000	-	

52	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1	Doku men	100,000,00 0	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1	Doku men	100,000,0 00	-	
53	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		Doku men	-	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		Doku men	-	-	
<b>JUMLAH</b>						<b>16,179,65 5,600</b>						<b>25,389,46 3,131</b>	<b>9,209,807,5 31</b>	

### **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun 2024 berasal dari usulan Kecamatan dan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Usulan program dan kegiatan selanjutnya akan dilakukan verifikasi ulang menyesuaikan dengan tujuan, indikator, dan lokasi Prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan juga memperhatikan dukungan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, ketahanan pangan, iklim usaha dan investasi. Lingkungan hidup, hukum dan keamanan Provinsi yang terkait dengan pembangunan Kabupaten.

Kebijakan yang dibuat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang merupakan tindak lanjut kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengaturan dan pengelolaan bidang Pertanahan dan Tata Ruang.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi**

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
	<b>Nasional</b>		
	<b>PENATAAN RUANG</b>		
1	Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis	RPJMN 2015-2019 Bindang Tata Ruang dan Pertanahan (PP No.2 Tahun 2015)	
2	Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang		
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang		
4	Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur		
	<b>PERTANAHAN</b>		
1	Membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif	RPJMN 2015-2019 Bindang Tata Ruang dan Pertanahan (PP No.2 Tahun 2015)	

2	Reforma agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan Pemberdayaan masyarakat		
---	---	--	--

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
3	Pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum		
4	Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan		
B	<b>PROVINSI</b>		
	<b>PENATAAN RUANG</b>		
1	Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batu bara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat	Perda tentang Perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036	
2	Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi yang wilayah dan nasional		
3	Perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau		
4	Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi		
5	Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelstarian lingkungan serta menunggang aspek politik, Pertahanan dan keamanan		

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan, perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang handal di bidang pertanahan dan penataan ruang. Untuk itu disusun Visi dan Misi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang akan dicapai melalui tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan pendukung. Dalam hal ini Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pernyataan untuk mendukung visi dan misi Bupati, yaitu “ Terwujudnya Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia. Selanjutnya dalam keterkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, beberapa program, kegiatan/sub kegiatan di rencanakan pada tahun 2024 dan secara berkesinambungan akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan periode RPJMD.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan PD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Visi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebagaimana yang pada tabel di bawah ini berikut dengan perkiraan maju tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
0 1 .	0 3. 2	1 2							
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW		75 Persen	4,100,000,000	APBD		80	2,300,000,000
0 1 .	0 3. 2	1 2	2.0 1					4	1,050,000,000
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Indeks Perencanaan Tata Ruang		11 Persen	1,050,000,000				
0 1 .	0 3. 2	1 2	2.0 1	0 2				1	400,000,000
	<b>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1 Dokumen	400,000,000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0 1 .	0 3. 2 1 3	0 1 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	400,000,000	APBD		1 250,000,000
0 1 .	0 3. 2 1 4	0 1 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Loa Janan, Muara Badak, Sanga Sanga, Marang Kayu	4 Dokumen	250,000,000	APBD		4 250,000,000
0 1 .	0 3. 2 2	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		15.0 4 Persen	1,500,000,000			27.29 400,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	03.	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bangun		Dokumen	1,200,000,000	APBD	Tenaga Ahli untuk penyusunan Peta Dasar RDTR Kota Bangun Darat	1	400,000,000
01.	03.	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara		Dokumen	300,000,000	APBD	Honorarium Narasumber, fasilitasi Kelompok Kerja/ Komunitas Tata Ruang	-	-
01.	03.	12	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Pemanfaatan Tata Ruang</b>		<b>5.03</b>	<b>Persen</b>	<b>550,000,000</b>			<b>5.03</b>	<b>450,000,000</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0	0	1	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Sanga Sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu	20	Dokumen	400,000,000	APBD	20	300,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
0	0	1	2.0	0	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Loa Janan, Kota Bangun, Marang Kayu	1	Dokume n	150,000,000	APBD	20	150,000,000
1	3.	2	3	2									
0	0	1	2.0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang		3.75	Persen	1,000,000,000		3.77	550,000,000
1	3.	2	4										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0	0	1	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Loa Janan, Kota Bangun, Muara Badak, Muara Muntai, Muara Kaman, Muara Jawa		Dokumen	300,000,000	APBD	Tenaga Ahli untuk penyusunan dokumen insentif dan disinsentif		-
1	3.	2	4	1										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0	0	1	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Tenggaro ng Seberang, Muara Wis	1	Dokume n	250,000,000	APBD	1	200,000,000
1	3.	2	4	2									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0	0	1	2.0	0	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak,	20	Kasus	150,000,000	APBD		20	150,000,000
1	3.	2	4	3				1	Dokumen				300,000,000	
2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76	Nilai	13,772,674,467	APBD		77	10,894,855,936

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi		15	Dokumen	225,000,000			15	125,000,000
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	10	Dokumen	175,000,000	APBD	- Pembuatan SOP	10	75,000,000
2	1	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	5	Laporan	50,000,000	APBD		5	50,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2	Laporan	8,570,708,983			2	8,229,050,452
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	74	Orang/bulan	8,320,708,983.00	APBD		74	7,979,050,452.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	2	Laporan	250,000,000	APBD	2	250,000,000
2	1	0	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah		1	Dokumen	75,000,000		1	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 0 1. 3 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1 Laporan	75,000,000	APBD	Pensmbahan Volume honorarium PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	1	50,000,000
2 0 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	360,000,000			1	-
2 0 1 2:0 5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	156 Stel	160,000,000				-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	1	2:0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30	Orang	200,000,000		Dalam rangka menunjang Dedikasi Program Idaman bid Pengembangan dan peningkatan Kapasitas SDM Aparatur perlu di alokasikan Diklat dan kursus singkat bidang tekhnis Pertanahan dan penataan ruang, sehingga kinerja SDM meningkat, terarah, efektif dan efisien dalam mendukung Organisasi	30	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	Layanan	906,160,000			7	755,000,000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1	Paket	35,000,000	APBD		9	35,000,000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	45	Paket	206,160,000	APBD	Terdapat beberapa tambahan perlengkapan kantor di masing-masing bidang	45	105,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	3	Paket	210,000,000	APBD		3	210,000,000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	4	Paket	60,000,000	APBD		4	60,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	2,790	Dokumen	15,000,000	APBD		2,790	15,000,000
2	1	0	2.0	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	Paket	50,000,000		Salah satu fungsi OPD bisa jemput bola memberikan pelayanan dan sekaligus sosialisasi, sehingga melalui partisipasi ekspo.merah putih kecamatan adalah hal yg tepat dan baik di ikuti, mengingat pembiayaan	1	-



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0	2.0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000
2	1	0	2.0		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>200,000,000</b>				-
2	1	0	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	Unit	200,000,000		Tambahan peralatan kerja kebutuhan kantor	20	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	1,418,305,484			12	1,418,305,484
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	5	Laporan	215,000,000	APBD		5	215,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 0 1. 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	59 Laporan	1,203,305,484	APBD		1,203,305,484	
2 0 1. 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah		16 Unit	2,017,500,000			317,500,000	
2 0 1. 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	11 Unit	67,500,000	APBD		67,500,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	5	Unit	650,000,000	APBD	Asset kendaraan roda 4 dimiliki Dinas dalam mendukung aktifitas dan kinerjanya sangat diprioritaskan dalam pemenuhan jumlah serta pembiayaan maintenance nya, karena kondisi kendaraan yg sdh diatas 10 tahun, dgn mobilitas kegiatan yang tinggi, sehingga dibutuhkan Penambahan penganggaran ut menjadi perhatiannya		250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 0 1 09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	Gedung		1,300,000,000		Rehab Gedung Kantor dan Rumah Dinas		
2 0 2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi		45 Persen	100,000,000	APBD		60	100,000,000
2 0 2 1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100,000,000			1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	Muara Badak, Sebulu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu	1	Dokumen	100,000,000	APBD	1	100,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		90	Persen	300,000,000	APBD	95	300,000,000
	0	4										
2	1	0	2.0	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		23	Dokume n	300,000,000		23	300,000,000
	0	4	1									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	0	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)	2	Dokumen	200,000,000	APBD		2	200,000,000
2	1	0	2.0	0	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Anggana, Muara Badak, Sebulu, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Marang Kayu	21	Berita Acara	100,000,000	APBD		21	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		80	Persen	4,850,000,000	APBD		85	350,000,000
2	1	0	2.0	1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5	Dokumen	4,850,000,000			5	350,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Muara Badak, Tenggara, Kembang Janggut	5	Dokumen	4,850,000,000	APBD	Belanja Modal Lahan : - Dokumen Perluasan Kantor Camat Tabang dan Dokumen Penyiapan Lokasi TPA Kecamatan Tabang (Kolaborasi), - Dokumen Pengadaan Tanah untuk SD 011 Desa Salo Cella (Kolaborasi), - Pembebasan lahan di belakang kantor DPPR	5	350,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan		90	Persen	600,000,000	APBD		95	600,000,000
2	1	0	2.0	1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum		4	Dokumen	400,000,000			4	400,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	0	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Muara Badak, Sebulu (Giri Agung), Kota Bangun, Muara Kaman (Bunga Jadi), Muara Jawa, Marang Kayu	1	Dokumen	200,000,000	APBD	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah sama dengan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.	1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	0	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kembang Janggut (Long Beleh Haloq), Tabang (Gunung Sari, Long Lalang), Marang Kayu	1	Dokumen	-	APBD	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah sama dengan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.	1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	0	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Anggana, Muara Badak, Sebulu, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Marang Kayu	1	Dokumen	100,000,000	APBD		1	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 1 0 0 6 1 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kecamatan Kembang Janggut (Desa Long Beleh Haloq) (Desa Long Beleh Modang), Tabang (Desa Long Lalang), Marang Kayu (Desa Santan Tengah) (Desa Semangkok) (Desa Santan Ulu)	1	Dokumen	100,000,000	APBD	1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0	2.0	2	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	Dokumen	200,000,000		2	200,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	0	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bangun , Kenohan , Muara Kaman	1	Dokumen	200,000,000	APBD	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sama dengan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.	1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	0	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kembang Janggut (Desa Long Beleh Haloq) (Desa Long Beleh Modang), Muara Muntai (Desa Perian) (Desa Muara Leka), Muara Wis (Desa Lebak Mantan), Tabang (Desa Long Lalang) (Desa Gung Sari).	1	Dokumen	-	APBD	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sama dengan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.	1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	0			<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat		45	Persen	250,000,000	APBD		60	300,000,000
2	1	0	2.0	1	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota</b>	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota		2	Dokumen	250,000,000			3	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 1 0 7 1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Anggana , Sebulu , Muara Kaman , Sanga Sanga	1 Laporan	175,000,000	APBD	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguakuan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sama dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.	1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Sangasanga, Anggana	1	Dokumen	-	APBD	Output yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sama dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.	1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	7	2.0	3	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	75,000,000			1	100,000,000
2	1	0	8		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat</b>		<b>65</b>	<b>Persen</b>	<b>824,799,664</b>	<b>APBD</b>		70	<b>834,799,664</b>
2	1	0	2.0	1	<b>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>	<b>Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong</b>		<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100,000,000</b>			<b>1</b>	<b>100,000,000</b>
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Kecamatan Anggana dan Muara Badak	1	Laporan	100,000,000	APBD		1	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 0 8 2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		2 Dokume n	724,799,664			2	734,799,664
2 0 8 2 0 1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Kecamatan Kota Bangun, Kembang Janggut,ten ggarong, Tenggaron g Seberang, Loa janan	1 Laporan	-	APBD	Output yang dihasilkan dari kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong sama dengan pemanfaatan tanah kosong sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.	1	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2 1 0 8 2 0 2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Kecamatan Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Loa Janan, Tabang, Kembang Janggut	1	Dokumen	724,799,664	APBD	Output yang dihasilkan dari kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong sama dengan pemanfaatan tanah kosong sehingga perlu digabung untuk memaksimalkan output.	1	634,799,664
2 1 0 9	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat		84	Persen	391,989,000	APBD		85	200,000,000
2 1 0 9 1	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT		2	Dokumen	391,989,000			2	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2 1 0 0 9 1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Muara Muntai, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Tenggaron g, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tabang, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Tenggaron g Seberang, Marang Kayu, Muara Wis	1	Dokume n	192,545,000	APBD	Sosialisasi dan SKPT Ke Kecamatan	1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	0	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Loa Janan, Muara Badak, Kota Bangun, Kembang Janggut, Samboja	1	Dokumen	199,444,000	APBD	Sosisasi Revisi Perbub	1	100,000,000
2	1	1			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase tersedianya Penatagunaan Tanah		78	Persen	200,000,000	APBD		79	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 1 0 1	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		2	Dokume n	200,000,000		1	300,000,000
2 1 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bangun	1	Laporan	100,000,000	APBD	1	100,000,000
2 1 0 1	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Kecamatan Kota Bangun, Loa Kulu, Tenggaron g Seberang	1	Dokume n	100,000,000	APBD	1	100,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	1	1	2.1	0	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Kota Bangun		Dokumen	-	APBD		1	100,000,000
					<b>JUMLAH</b>									<b>16,179,655,600</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai kartanegara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

#### **5.2 Rencana tindak lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Tanggal, Maret 2023

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang



**SETIANTO NUGROHO AJL, SH.,M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671027 199403 1 008